

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TRANSPARANSI  
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
(Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)



Oleh

**ELDA SOFIA MARYANTI**  
00377/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
Wisuda Periode Maret 2013

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

(Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)

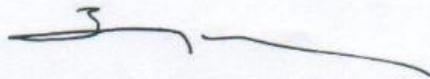
Nama : Elda Sofia Maryanti  
BP/NIM : 2008/00377  
Konsentrasi : Sektor Publik  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Negeri Padang

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Maret 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing:

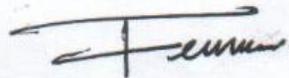
Padang, Januari 2013

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Drs. H. Syamwil, M.Pd  
NIP. 19590820 198703 1001



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1003

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TRANSPARANSI  
TERHADAP PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH**

*(Studi Empiris Pada DPKD Kota Di Sumatera Barat)*

**Elda Sofia Maryanti**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email: [eldasofia.maryanti@yahoo.com](mailto:eldasofia.maryanti@yahoo.com)

**Abstrak**

Suatu keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi dan keadilan saja, namun faktor desentralisasi fiskal dan transparansi sangat menentukan kesuksesan dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka, dalam penelitian ini penulis ingin menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Untuk menguji hipotesis ini penulis menggunakan data primer dengan cara menyebar kuesioner, yang disebarkan secara langsung ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota yang ada di Sumatera Barat. Setelah data dianalisis, ditemukan semua hipotesis dapat diterima. Untuk itu disarankan agar semua pihak yang ada dalam suatu instansi menyadari pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan instansi. Diharapkan juga pada semua instansi agar dapat mengambil langkah perbaikan dalam meningkatkan penerapan desentralisasi fiskal dan transparansi yang mendukung sepenuhnya dalam efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada suatu instansi pemerintahan. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka peneliti menyarankan agar dapat meneliti di DPKD kabupaten di Sumatera Barat, atau meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

**Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Transparansi, dan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

***Abstract***

*A successful financial management area is not only determined by the factors of production and justice alone, but factors of fiscal decentralization and transparency is critical to the success in the financial management of regional finances. Thus, in this study the authors wanted to examine the influence of fiscal decentralization and transparency in the financial management area. To test this hypothesis the author uses primary data by spreading the questionnaire, which was distributed directly to the Office of Financial Management (DPKD) city in West Sumatra. Once the data is analyzed, it was found all the hypotheses can be accepted. It is recommended that all parties are in an agency aware of the importance of local financial management in achieving agency goals. It is expected also to all agencies in order to take corrective measures to improve the implementation of fiscal decentralization and transparency are fully supports the effectiveness of the financial management area at a government agency. For researchers who are interested in researching the same title, the researchers suggest in order to examine in DPKD districts in West Sumatra, or examine other factors that may affect the financial management area.*

*Keywords: Fiscal Decentralization, Transparency, and Financial Management Area.*

## PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Menurut Domai (2002) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
- (2) Setiap anggaran daerah yang dibuat/disusun diusahakan perbaikan-perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya.
- (3) Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan
- (4) Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Untuk menampung dan menganalisa serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

Menurut Ahmad (2004) asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- (a) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatuhan dan kepatutan.

- (b) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Menurut Ahmad (2007:345) untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi dan keadilan saja namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor desentralisasi fiskal dan transparansi sangat menentukan kesuksesan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan Mardiasmo (2002:105) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah antara lain desentralisasi fiskal, transparansi, akuntabilitas, *value for maney* dan pengawasan fungsional. Maka, dalam penelitian ini penulis ingin menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi fiskal adalah sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, perlu diterapkan faktor desentralisasi fiskal, hal ini mengingat masih banyak terdapat pengelolaan keuangan daerah yang belum sesuai dengan standar dan UU yang berlaku.

Desentralisasi fiskal merupakan faktor yang penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya faktor Desentralisasi fiskal maka suatu daerah akan memiliki kemandirian dalam pembiayaan belanja daerah dan kegiatan pembangunan didaerah tanpa tergantung kepada pemerintah pusat. Faktor transparansi juga diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Transparansi mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, jika di suatu instansi pemerintahan tidak adanya transparansi

maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan sesuai dengan rencana dan dengan demikian tujuan instansi pemerintahan tidak akan tercapai. Transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, maka faktor ini sangat penting untuk diterapkan (Mardiasmo, 2002:105). Implikasi dari penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu akan dapat memenuhi keingintahuan dari anggota masyarakat dan akan mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud secara efektif maka kedua faktor tersebut yaitu desentralisasi fiskal dan transparansi haruslah diperhatikan. Hal ini penting diteliti untuk mengingat jika disuatu instansi pemerintah masih kurang efektifnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan transparan akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan dengan baik.

Seperti yang terjadi di Sumatera Barat, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah semester II 2011 untuk 9 kabupaten/kota belum satupun yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semua daerah itu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto dan Kota Payakumbuh. Opini audit tersebut menimbulkan indikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan untuk Kota Pariaman, BPK menemukan Belanja bantuan sosial minimal Rp 563, 53 juta belum dilengkapi dengan bukti pendukung dan terdapat bantuan sosial sebesar Rp 188,25 juta yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Fenomena ini menunjukkan lemahnya penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak adanya bukti pendukung terhadap pengeluaran yang telah terjadi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti Zulyanto (2010) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dan juga merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Widya (2009) yang meneliti tentang pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan responden pegawai DPKD Kota di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang bahwa transparansi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah”**. (*Studi Empiris Pada DPKD Kota di Sumatera Barat*)).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota di Sumatera Barat. (tabel 1). Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai DPKD. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *Random sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data subjek. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner.

Sebelum dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu dilakukakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji Normalitas, uji Multikolinearitas dan uji Heterokedastisitas. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, Uji F, uji koefisien determinasi dan uji t.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil olahan data, hasil uji normalitas menunjukkan level signifikan masing-masing variabel lebih besar dari  $\alpha$  ( $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian dapat dinyatakan data dari ke tiga variabel penelitian terdistribusi normal sehingga layak dipakai untuk analisis regresi berganda. (Tabel 2).

Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF  $< 10$  dan *Tolerance*  $> 0,10$ . Berdasarkan pengolahan data, dapat dilihat hasil perhitungan nilai VIF dan *Tolerance*. Masing-masing variabel bebas tersebut memiliki nilai VIF  $< 10$  dan nilai *Tolerance*  $> 0,10$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas dan model ini layak digunakan dalam analisis regresi berganda. (Tabel 3).

Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas digunakan uji *Glejser*. Apabila nilai sig  $> 0,05$  maka data tersebut bebas dari heterokedastisitas. Variabel desentralisasi fiskal dan transparansi memiliki nilai sig  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak digunakan dalam analisis regresi berganda. (Tabel 4).

### Hasil Penelitian

Dari pengolahan data statistik, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 6,979 + 0,448X_1 + 0,623X_2$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Konstanta ( $\alpha$ )

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 6,979. Hal ini berarti bahwa jika variabel independen yaitu desentralisasi fiskal dan transparansi adalah nol, maka nilai pengaruh pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar konstanta 6,979.

#### b. Koefisien Regresi ( $\beta$ ) $X_1$

Koefisien desentralisasi fiskal sebesar 0,448 ini berarti bahwa dengan meningkatnya desentralisasi fiskal satu satuan, maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,448.

#### c. Koefisien regresi ( $\beta$ ) $X_2$

Koefisien transparansi sebesar 0,623 ini berarti bahwa dengan meningkatnya transparansi satu satuan, maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,623.

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak. Dari hasil analisis data yang diperoleh mengenai desentralisasi fiskal dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai  $F_{hitung} = 11,291 > F_{tabel} = 3,16$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang digunakan sudah *fix*, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian. (tabel 5).

Untuk pengujian koefisien determinasi, nilai *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 25,9% sedangkan sisanya 74,1% ditentukan oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini. (Tabel 6).

Untuk mengungkapkan pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model ini digunakan terdiri dari dua variabel dependen yaitu desentralisasi fiskal ( $X_1$ ) dan transparansi ( $X_2$ ) dan satu variabel independen yaitu pengelolaan keuangan daerah (Y). Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini ditunjukkan dalam (Tabel 7).

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang dihasilkan dengan alpha 0,05

atau dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 7. Koefisien Regresi Dan Uji Hipotesis**

|       |                      | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |       |      |
|-------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
| Model |                      | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)           | 6.979                       | 6.873      |                           | 1.016 | .314 |
|       | DesentralisasiFiskal | .448                        | .186       | .277                      | 2.410 | .019 |
|       | Transparansi         | .623                        | .179       | .400                      | 3.481 | .001 |

a. Dependent Variable: PengelolaanKD

## Pembahasan

### Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis SPSS versi 16 diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 0,259 atau 25,9% pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal dan transparansi. Sedangkan variabel lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 74,1%. Dari hasil uji F (hipotesis 1) dapat dilihat  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $11,291 > 3,16$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan desentralisasi fiskal dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Widya (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah antara lain transparansi dan desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap undang-undang dalam pengelolaan keuangan daerah diperiksa institusi pemeriksa internal daerah (Bawasda) maupun pemeriksa internal (BPK).

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa masih banyak variabel lain yang mempengaruhi

pengelolaan keuangan daerah selain desentralisasi fiskal dan transparansi yang hanya memiliki kontribusi sebesar 25,9%. Selain itu, variabel independen yang ada dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan keuangan daerah.

### Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis 2 ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,410 > 1,6573$ , nilai signifikansi  $0,019 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien  $\beta$  bernilai positif yaitu 0,277. Berdasarkan data distribusi frekuensi variabel desentralisasi fiskal dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden rata-rata adalah 76,43% dengan kategori baik. Item pertanyaan pada kuesioner ada yang berkategori sangat baik dan berkategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Aherudin (2008), dengan diterapkannya desentralisasi fiskal, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Richard dan Francois (2000) juga mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efisiensi karena pemerintah daerah mampu memperoleh informasi yang lebih baik (dibandingkan dengan pemerintah pusat) mengenai kebutuhan rakyat yang ada di daerahnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulyanto (2010) yang menyatakan adanya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## **Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dari hasil pengujian hipotesis 3 ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,481 > 1,6573$  atau nilai signifikansi  $0,001 < \alpha$   $0,05$  dan nilai koefisien  $\beta$  bernilai positif yaitu  $0,400$ . Berdasarkan data distribusi frekuensi variabel transparansi dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden rata-rata adalah  $57,35\%$  dengan kategori cukup baik.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah sudah mampu menerapkan transparansi sebagaimana yang diharapkan, sehingga pengelolaan keuangan daerah sudah dapat dikatakan efektif. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah maka prinsip ini sangat penting untuk diterapkan (Mardiasmo, 2002:30).

Teori ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Widya (2009) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya transparansi maka pemerintah sebagai pihak pemegang amanah yang mengelola keuangan wajib memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan. transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat meningkatkan keefektifan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah.

Teori dan hasil penelitian terdahulu konsisten atau sejalan dengan hasil temuan di lapangan yang dapat dilihat pada data distribusi frekuensi variabel. Dari data frekuensi diketahui bahwa transparansi berperan dalam pengelolaan keuangan daerah ini terbukti dengan nilai TCR yang dikategorikan cukup baik. Adanya laporan anggaran yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai TCR yang tertinggi dengan kategori baik. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh hasil penelitian ini adalah desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota di Sumatera Barat dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah pada DPKD Kota di Sumatera Barat.

### **Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran bahwa Untuk meningkatkan proses pengelolaan keuangan daerah yang efektif maka instansi perlu untuk melaksanakan desentralisasi fiskal yang cukup baik, selain itu juga diperlukan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Untuk penelitian selanjutnya, apabila menggunakan kuisisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuisisioner dimodifikasi, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan pengelolaan keuangan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aheruddin. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Melalui (<http://www.sumbawanews.com>). (8/10/2011).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. 2010. *Opini LKPD di Wilayah Propinsi Sumatera Barat*.

- Bird, Richard dan Vaillancourt Francois. 2000. *Desentralisasi fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Terjemahan Almizan Ulfa. Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi tantangan dan hambatan*. Jakarta : PT Kemitraan
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Refnaldi. 2011. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi UNP.
- Sari, Widya. 2009. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi UNP.
- Sasana, Hadi. 2009. *Pengaruh desentralisasi Fiskal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi Bandung.
- Tjahjanulin, Domai. 2002. *“Buku Ajar Administrasi Keuangan Daerah”*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*. [www.google.com](http://www.google.com)
- Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zulyanto, Aan. 2010. *Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah*. Skripsi Universitas Lampung.

## LAMPIRAN

**Tabel 1. Daftar Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota di Sumatera Barat**

| No | DPKD Kota      | Jumlah Pegawai | Sampel |
|----|----------------|----------------|--------|
| 1. | Padang         | 40             | 11     |
| 2. | Bukittinggi    | 30             | 9      |
| 3. | Pariaman       | 31             | 9      |
| 4. | Padang Panjang | 35             | 10     |
| 5. | Payakumbuh     | 44             | 12     |
| 6. | Solok          | 35             | 10     |
| 7. | Sawahlunto     | 34             | 10     |
|    | Jumlah         | 249            | 71     |

**Tabel 2. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                | Pengelolaan              | Desentralisasi | Transparansi | Unstandardized |            |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|
|                                | KD                       | Fiskal         |              | Residual       |            |
| N                              | 60                       | 60             | 60           | 60             |            |
| Normal Parameters <sup>a</sup> | Mean                     | 38.5000        | 30.5000      | 28.6833        | .0000000   |
|                                | Std. Deviation           | 10.24860       | 6.33125      | 6.57549        | 8.67352018 |
|                                | Most Extreme Differences | Absolute       | .170         | .135           | .147       |
|                                | Positive                 | .170           | .067         | .147           | .139       |
|                                | Negative                 | -.098          | -.135        | -.088          | -.085      |
| Kolmogorov-Smirnov Z           | 1.319                    | 1.047          | 1.142        | 1.075          |            |
| Asymp. Sig. (2-tailed)         | .062                     | .223           | .147         | .198           |            |

a. Test distribution is Normal.

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

**Coefficients(a)**

| Model |                       | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |       | Collinearity Statistics |           |       |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------------------------|-----------|-------|
|       |                       | B                           | Std. Error | Beta                      | t     | Sig.                    | Tolerance | VIF   |
|       |                       | 1                           | (Constant) | 6.979                     | 6.873 |                         | 1.016     | .314  |
|       | Desentralisasi Fiskal | .448                        | .186       | .277                      | 2.410 | .019                    | .954      | 1.049 |
|       | Transparansi          | .623                        | .179       | .400                      | 3.481 | .001                    | .954      | 1.049 |

a. Dependent Variable: Pengelolaan KD

**Tabel 4. Uji Heterokedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                       | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |  | t     | Sig. |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|-------|------|
|       |                       | B                           | Std. Error | Beta                      |  |       |      |
| 1     | (Constant)            | .624                        | 4.562      |                           |  | .137  | .892 |
|       | Desentralisasi Fiskal | .154                        | .123       | .166                      |  | 1.245 | .218 |
|       | Transparansi          | .036                        | .119       | .041                      |  | .306  | .761 |

a. Dependent Variable: AbsUt

**Tabel 5. Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 1758.433       | 2  | 879.216     | 11.291 | .000 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 4438.567       | 57 | 77.870      |        |                   |
|       | Total      | 6197.000       | 59 |             |        |                   |

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Desentralisasi Fiskal

b. Dependent Variable: Pengelolaan KD

**Tabel 6. Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .533 <sup>a</sup> | .284     | .259              | 8.82438                    |

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Desentralisasi Fiskal

b. Dependent Variable: Pengelolaan KD

## KUESIONER

### **KUESIONER IDENTITAS RESPONDEN**

No. Responden : (Diisi oleh peneliti)

Nama Kantor : \_\_\_\_\_

- Jenis Kelamin :  Laki-laki  
 Perempuan
- Jabatan :  Direksi  
 auditor Internal  
 Karyawan/i
- Pendidikan Terakhir :  SMA  
 D3  
 S1  
 S2  
 Lain-lain (.....)
- Lama Bekerja :  < 5 Tahun  
 ≤ 10 Tahun  
 >10 Tahun
- Jurusan :  Akuntansi  
 Manajemen  
 Hukum  
 Lain-lain (.....)
- Kursus yang pernah diikuti :  Komputer  
 Bahasa Inggris  
 Pajak  
 Lain-lain (.....)

## 1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Y)

| NO  | Pernyataan   | SL                       | SR                       | K                        | P                        | TP                       |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Perencanaan Keuangan Daerah</b>        |  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1   | Dokuman penyusunan anggaran yang disampaikan oleh SKPD menyajikan informasi yang jelas.                  | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Perencanaan dalam pengambilan keputusan melibatkan partisipasi masyarakat.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pelaksanaan Keuangan Daerah</b>        |  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 3   | Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.                                    | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Semua manfaat yang bernilai uang dianggarkan dalam APBD.   | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Pendapatan daerah disetor sepenuhnya ke kas daerah tepat pada waktunya.                                  | <input type="checkbox"/> |
| 6   | Dana yang tersedia dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepentingan masyarakat.    | <input type="checkbox"/> |
| 7   | Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan otorisasi setiap adanya pengeluaran atas beban APBD.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pelaporan Keuangan Daerah</b>          |  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 8   | Laporan keuangan yang dilaporkan masing-masing daerah menyediakan informasi yang relevan.                | <input type="checkbox"/> |
| 9   | Laporan keuangan dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan standar akuntansi yang diterima umum.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</b> |  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 10  | Masing-masing daerah menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara terperinci.       | <input type="checkbox"/> |
| 11  | Setiap pejabat pengelolaan keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pengawasan Keuangan Daerah</b>         |  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 12  | Pengawasan atas APBD dilakukan oleh DPRD.  | <input type="checkbox"/> |

Petunjuk pengisian kuesioner

Bapak/Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini, kemudian dimohonkan menjawab pertanyaan tersebut dengan memberi *check list* (√) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih:

- S : Selalu  
SR : Sering  
K : Kadang-Kadang  
P : Pernah  
TP : Tidak Pernah

## 2. DESENTRALISASI FISKAL (X<sub>1</sub>)

| NO | Pernyataan   | SL                       | SR                       | K                        | P                        | TP                       |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Adanya pemberian wewenang/otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri.  | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Adanya penunjukkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dengan tanggung jawab pada pemerintah pusat.                       | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Pelaksanaan kegiatan transfer ke daerah dilakukan tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil.  | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Pengeluaran pemerintah dilakukan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah.  | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Dana bagi hasil yang merupakan bagian daerah disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.  | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Penyempurnaan implementasi di daerah dilakukan secara berkesinambungan.  | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Adanya peningkatan alokasi transfer ke daerah dari tahun ke tahun.   | <input type="checkbox"/> |

## 3. TRANSPARANSI (X<sub>2</sub>)

| NO | Pernyataan   | SL                       | SR                       | K                        | P                        | TP                       |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Adanya kejelasan peranan dan tugas masing-masing pegawai.  | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Adanya kejelasan tanggung jawab pegawai sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan.   | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Adanya laporan anggaran yang meliputi realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.   | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Kode akun ( <i>chart of accounts</i> ) pada laporan keuangan pemerintah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.                        | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Selama ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijaksanaan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah dilakukan tepat pada waktunya.  | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Selama ini usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang baik.                                  | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Saat ini pemerintah daerah telah memiliki system informasi mengenai kebijakan anggaran.  | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Sudah ada mekanisme pemeriksaan (audit) laporan keuangan pemerintah oleh auditor eksternal yang independen.                                      | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Sudah ada mekanisme tanggapan dan penyelesaian atas temuan auditor atau pemeriksa.   | <input type="checkbox"/> |